



Analisis Sistem Penanganan Bencana di GBKP Klasis Sinabun terhadap Resiliensi Masyarakat Penyintas Gunung Sinabung

Eikel Karunia Ginting

Universitas Kristen Duta Wacana

eikelginting63@gmail.com

Abstract

This paper analyzes the disaster management system in GBKP Klasis Sinabun which is closely related to the presbyterial-synodal system. This system has vulnerabilities due to the slow handling of disasters due to presbyterial decisions (elders) and the role of the synodal (center). In analyzing the context of the problem, the author uses the theory of resilience and human security to see the problems and challenges that exist in fulfilling the security of the community around Sinabung. The theory of resilience and human security also provides an evaluation for holistic disaster management to have a vital impact between GBKP Klasis Sinabun and the community around Sinabung. This research uses a literature approach, and descriptive analysis method combined with interviews.

Keywords: Mount Sinabung Eruption Survivors, Karo Batak Protestant Church (GBKP), Disaster Risk Management, Human Security, Resilience.

Abstrak

Tulisan ini menganalisis sistem penanganan bencana di GBKP Klasis Sinabun yang berkaitan erat dengan sistem presbiterial-sinodal. Sistem ini memiliki kerentanan karena lambatnya penanganan bencana akibat keputusan presbiterial (tua-tua/penatua) dan juga peran secara sinodal (pusat). Dalam menganalisis konteks permasalahan, penulis menggunakan teori resiliensi dan keamanan insani dalam melihat problem dan tantangan yang terdapat dalam pemenuhan keamanan masyarakat sekitar Sinabung. Teori resiliensi dan keamanan insani juga memberi evaluasi bagi penanganan bencana secara holistik agar dapat berdampak secara vital antara GBKP Klasis Sinabun dan masyarakat sekitar Sinabung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dan metode deskriptif analisis yang dipadukan dengan wawancara.

Kata-kata kunci: Penyintas Erupsi Gunung Sinabung; Gereja Batak Karo Protestan (GBKP); Sistem Penanganan Bencana; Keamanan Insani; Resiliensi.

Pendahuluan

GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) adalah gereja yang lahir dari pekerjaan pekabaran Injil *Nederlandsche Zending Genootschap* (NZG) pada tahun 1890 (Th. Muller Kruger, 1959), 199). GBKP memiliki wilayah pelayanan di daerah sekitar Gunung

Sinabung. Wilayah pelayanan tersebut masuk dalam pelayanan Klasis Kabanjahe dan Sinabun. Kedua klasis tersebut sejak tahun 2010 berhadapan langsung dengan bencana Sinabung dan bersinergi sebagai perpanjangan tangan Moderamen (Sinode Pusat) untuk melakukan intervensi penanggulangan bencana, pemulihan mental, dan pemenuhan kebutuhan pokok penyintas Sinabung (*Oneclickgbkp*, n.d.).

Sesuai Sistem GBKP yaitu sistem presbiterial-sinodal dalam penanganan permasalahan dilakukan secara berjenjang. Wilayah sinode berfokus dan mencakup intervensi pelayanan khusus yang terdiri dari seluruh Pendeta, Pertua, dan Diaken dengan bidang pelayanan bersifat makro. Lalu pada wilayah Klasis sasaran program pelayanan adalah seluruh Pertua dan Diaken dengan bidang pelayanan bersifat makro (teknis). Sedangkan wilayah *runggun* (gereja lokal) menyasar program pelayanan kepada warga di gereja lokal. Ketiga medan pelayanan dalam sistem di GBKP berjalan secara aplikatif melalui tri-tugas gereja (marturia, koinonia, diakonia) dan melakukan pembinaan-pembinaan (Moderamen GBKP, 2021-2025, 11-12).

Permasalahan terletak pada penerapan sistem di GBKP. Keputusan yang bersifat sinodal tidak kontekstual pada situasi lokal jemaat. Keputusan tersebut tidak berdampak pada gereja lokal apalagi masyarakat sekitar. Keputusan hanyalah bersifat tekstual dan keputusan yang diambil tidak seragam dengan hasil dari keputusan secara sinodal. Keputusan secara pusat tidak relevan dengan konteks lokal menjadi titik permasalahan termasuk dalam penanganan kasus bencana. Menurut Avery Dulles peran gereja secara organisatoris hendaknya mendorong terjadinya partisipasi serta keterlibatan setiap kelompok jabatan serta saling bersinergi dalam penerapannya agar memiliki manfaat secara sistem (Avery Dulles S.J, 1990,92). Kurang berjalannya hasil keputusan sinode secara baik ke tingkat lokal memiliki banyak faktor penyebab, di antaranya dapat disebabkan oleh pemimpin jabatan khusus (Pendeta, Penatua, dan Diaken) yang tidak melakukan keputusan ini sesuai dengan rencana. Faktor lain karena jemaat ataupun masyarakat yang tidak melaksanakan himbauan dan rencana yang telah ditetapkan bersama dalam kasus bencana.

Dalam membaca permasalahan ini, diperlukan adanya partisipasi yang vital antara jemaat dan sistem fungsional gereja. Kesadaran jemaat dibutuhkan dalam melakukan penerapan peraturan yang sudah diputuskan secara sinodal dengan tetap mempertimbangkan lokalitas masyarakat (Dr. Jan Hendriks, 2002, 46). Kesadaran jemaat dan juga sinergi bersama dibutuhkan dalam penanggulangan dampak erupsi Gunung Sinabung yang belum usai. Menurut Ramirez (2007, 777-778) resiliensi adalah kemampuan untuk melawan kembali dan berupaya beradaptasi menyesuaikan situasi ancaman ataupun bencana yang mengancam bagi kehidupan. Jika merujuk pada kamus Merriam Webster yang dimaksud resiliensi (*resilience*) adalah kapabilitas untuk bangkit dan menyesuaikan ketahanan setelah berhadapan terhadap bencana atau sesuatu yang merugikan (*Resilience Definition & Meaning - Merriam-Webster*, n.d.).

Hubungan antara resiliensi dan permasalahan penanganan bencana bagi penyintas Gunung Sinabung menjadi sesuatu yang memiliki urgensi terkait dengan ketahanan

masyarakat, terlebih masalah utama ialah kesadaran yang menjadi unsur dari resiliensi terkesan diabaikan demi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi (Ginting, 2021). Oleh karena permasalahan tersebut, tulisan ini akan menganalisis dan memberi evaluasi bagi peran GBKP Klasis Sinabun dalam melakukan penanganan bencana.

Metode

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan terhadap kepustakaan (buku-buku, artikel, dan situs internet) yang berhubungan dengan tulisan ini. Fokus dari penelitian ini menganalisis dan memberi evaluasi sistem penanganan bencana di GBKP Klasis Sinabun. Sistem Presbiterial-Sinodal yang menjadi sistem GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) berhubungan dengan implementasi penanggulangan bencana baik tingkat lokal hingga pusat (moderamen). Sistem penanganan bencana memiliki peran vital dan aktif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat penyintas bencana di daerah Gunung Sinabung. Secara khusus tulisan ini menggunakan analisis teori keamanan insani dan resiliensi yang menjadi sudut pandang melihat sisi kerentanan masyarakat Sinabung dan GBKP Klasis Sinabun. Uraian ini juga dilengkapi dengan analisis dan uraian deskriptif-analitis terhadap peningkatan kapabilitas yang secara holistik dalam konteks bencana Gunung Sinabung.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Keamanan Insani dan Resiliensi

Melihat ancaman bencana dalam pemikiran perspektif keamanan insani, perlu dipahami bahwa konsep keamanan insani menekankan pada konsep individu menjadi pusat dalam menanggulangi ancaman dan tantangan yang ada. Pengutamaan pada konsep keamanan insani ialah peran negara yang menjamin keamanan dan keselamatan manusia. Sebelum konsep keamanan insani menjadi inti tanggung jawab secara holistik, terdapat studi keamanan yang konservatif dengan mengutamakan perlindungan negara terhadap masyarakat dari ancaman perang antar-negara, teroris, dan berbagai ancaman yang datang dari luar negara. Perbedaan keamanan negara dan keamanan manusia (*human security*) terletak pada cakupan pemenuhan pada hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan pilihan untuk memenuhi potensinya sendiri (Commission For Human Security, 2003, 3).

Kepentingan rakyat atau kepentingan kemanusiaan secara kolektif menjadi fokus dalam peningkatan konsep keamanan insani. Melalui paradigma yang baru tersebut, keamanan insani mendorong peran individu dalam kebebasan, kedamaian dan keselamatan serta berpartisipasi penuh dalam perwujudan keamanan insani. Terdapat aspek yang relasional dan saling terhubung antara peran Negara dan kapasitas lokal (individu & masyarakat). Keamanan insani melihat dua aspek, di mana peran negara tetap memberikan keamanan dan perlindungan bagi warganya melalui regulasi dan peran secara preventif,

sehingga membuka ruang bagi individu untuk memenuhi keamanan insani bagi kehidupan (Commission For Human Security, 2003, 4).

Menurut Giorgio Shani, gagasan keamanan insani berlandaskan manusia sebagai individu yang tidak bisa direduksi. Sependapat dengan pernyataan Shani, Giorgio Agamben mengungkapkan esensi makna kehidupan melalui makna *bios* yang berarti manusia yang bermartabat dan diberkahi hak dalam hidup (Shani, 2010, 60). Melalui pemahaman manusia yang tidak bisa direduksi hak maupun kebebasannya, maka perlunya keamanan insani diwujudkan dalam kehidupan. Lalu perwujudan dalam pemenuhan esensi hidup manusia menurut Newman melalui kebebasan dari rasa takut (*freedom for fear*) dan kebebasan dari keinginan (*freedom from want*). Kedua aspek kebebasan menurut Newman akan memberi pemenuhan tanggung jawab secara etis dan orientasi individu sebagai manusia (Newman, 2010, 78).

Untuk mewujudkan kebebasan yang berlandaskan orientasi pada individu dan melakukan desekritisasi peran pemerintah ataupun Negara, maka individu maupun masyarakat perlu mendapatkan peningkatan kapasitas sebagai bentuk pemberdayaan keamanan manusia. Menurut Shani berlandaskan *Critical Human Studies* salah satu potensi peningkatan yang dapat dikembangkan ialah meningkatkan kebebasan manusia melalui kesempatan dan pilihan untuk memenuhi potensinya sendiri sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan mencegah konflik (Shani, 2010, 58). Sejalan dengan peningkatan potensi, Newman menjelaskan bahwa pendekatan *Broad Approach* juga pendekatan yang luas dan holistik dalam mewujudkan pemberdayaan dalam masyarakat. *Broad Approach* adalah upaya pendekatan melalui pendidikan yang diberikan semakin menambah kapabilitas manusia dalam memenuhi keamanan insani (Newman, 2010, 82).

Memahami perspektif keamanan manusia tidak akan terlepas dari peningkatan resiliensi. Menurut John Twigg resiliensi adalah kemampuan untuk menyerap, dan menyesuaikan terhadap suatu ancaman sehingga pendekatan resiliensi mengutamakan kemampuan yang ditekankan pada individu ataupun komunitas. Kemampuan itu ditingkatkan dalam tahapan melakukan adaptasi, dan mengelola ancaman dari bencana serta meningkatkan kemampuan untuk meminimalisasi risiko kerentanan, dapat dipahami bahwa resiliensi sebagai sebuah sistem untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam bencana (Geovasky, 2015, 4-5).

Kapasitas yang saling menopang menurut Reid akan menjadikan resiliensi yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya berpusat pada individu ataupun komunitas yang rentan, tapi mampu mengelola kerentanan yang ada menjadi kekuatan dalam peningkatan kapasitas kehidupan bersama melalui kesadaran dan pengelolaan komunitas masyarakat (Reid, 2012, 66-80; 70-71). Pendekatan resiliensi dengan nilai *local wisdom* (nilai/ ajaran budaya lokal masyarakat) memberikan kekayaan perspektif dalam kultur khususnya Indonesia untuk menghadapi kerentanan bencana yang sudah dari dahulu menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Dr. Syamsul Maarif, 2013, 53).

Pandangan GBKP Mengenai Bencana

Pandangan GBKP memiliki keterhubungan dengan pandangan Allah dalam situasi penderitaan dalam konteks bencana alam, sejalan dengan itu juga menurut BNPB bahwa gereja memainkan peran penting dalam penanggulangan dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana (Theophilus Yanuarto, 2021). Maka hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran gereja adalah kehadiran yang nyata dan cara pandang gereja mengenai bencana berdasarkan asumsi teologis bahwa Allah hadir dan berada dalam bencana tersebut.

Berhubungan dengan peran GBKP terhadap konteks bencana alam diuraikan dalam konfesi gereja sebagai sebuah landasan pikiran dan program GBKP yang menekankan pada poin penciptaan di BAB III (Moderamen GBKP, 2016, 14).

Ciptaan Allah yaitu alam semesta; langit dan bumi dan segala isinya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan (Kej 1-2; Mzm 24:1-2, Kolose 1:16). Allah hadir dari permulaan hingga akhir dan memerintah serta memelihara ciptaan-Nya dalam kasih setia (Mzm 146:9). Proses penciptaan Allah tidak berhenti: Allah terus menerus membaharui ciptaan, baik melalui peristiwa-peristiwa kehidupan maupun peristiwa alam (bencana-bencana)

Relasi antara ciptaan dan manusia diwujudkan GBKP dalam Garis-Garis Besar Pelayanan (GBP) pada BAB V, Poin 2.1 (Moderamen GBKP, 2022, 8).

- A. Strategi Pencapaian Sasaran Pelayanan Tahun 2022 berfokus kepada alam dan lingkungan (misi dunia).
- B. Melalui Model sinergi dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional yang aktif dalam Pekabaran Injil, Kelestarian Lingkungan, Kesehatan, dan Pengentasan Kemiskinan.
- C. Kesadaran dan keikutsertaan pelayan dan jemaat GBKP dalam mengatasi masalah-masalah nasional dan global yang semakin meningkat terkhusus dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Jelas melalui pandangan baik dalam Konfesi GBKP dan Garis Besar Pelayanan GBKP, bahwa tindakan dan arah gereja mendorong umat dan para pelayan untuk berpartisipasi aktif meningkatkan kesadaran tentang alam dan keutuhan ciptaan. Hal didasari dengan konsep teologis yang bukan berpusat pada manusia, namun kepada komitmen dan spiritualitas yang adil bagi seluruh ciptaan (Moderamen GBKP, 2021, 21).

Selayang Pandang Bencana Erupsi Sinabung

Gunung Sinabung yang ada di Kabupaten Karo memiliki hubungan erat serta keterkaitan dalam mewujudkan ruang hidup bersama dengan masyarakat di Kabupaten Karo. Hubungan erat masyarakat dengan ekosistem Gunung Sinabung dirasakan melalui ketergantungan dari kekayaan dan kesuburan tanah yang dimiliki oleh gunung tersebut. Masyarakat sangat bergantung kepada hasil alam yang menjadi mata pencaharian utama dalam melangsungkan hidup, sehingga alam merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Karo di sekitar lingkaran Gunung Sinabung (Gunung Sinabung, 2022).

Mulainya terjadi letusan pada tahun 2010 telah berdampak pada warga sekitar Gunung Sinabung yang telah menjadi korban baik secara material, mental, dan spiritual. Erupsi yang terjadi berdampak sangat besar bagi masyarakat sekitar Sinabung dikarenakan tipe erupsi yang berupa aliran piroklastik (awan panas), jatuhnya piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), aliran lava dan lahar menghabisi wilayah masyarakat dan pencaharian melalui hasil tani masyarakat Karo (Tim Redaksi BNPB, 2013). Erupsi menyebabkan masyarakat Karo tidak lagi dapat menghasilkan jeruk dan sayur untuk dijual, bahkan masyarakat Karo sudah mengalihkan dari tanaman jeruk ke tanaman kopi dan bunga. Meskipun sudah 12 tahun sejak kejadian awal erupsi Gunung Sinabung, namun masyarakat menyimpan luka dan merasa takut terhadap erupsi yang masih sering terjadi, bahkan fakta di lapangan menunjukkan banyak masyarakat yang trauma, ketika mendengar suara dari arah gunung.

Terlepas dari dampak yang dialami dan dirasakan, namun ada juga masyarakat yang tidak memedulikan himbuan pemerintah untuk menjaga jarak radius bertanam dan tetap melakukan aktivitas pertanian. Sesuai ketentuan pemerintah jarak aman berada di radius lewat dari 7 KM dan melewati batas aman radius (*Safety Zone*). Hal tersebut terjadi karena menurunnya intensitas erupsi yang terjadi sehingga masyarakat banyak mengabaikan sosialisasi tanggap bencana dan pendataan yang dilakukan baik dari pemerintahan maupun gereja. Permasalahan ini berlangsung dari tahun 2010 hingga saat ini (Abu Sinabung Kembali Membubung - *Historia*, n.d.).

Tantangan GBKP Klasis Sinabun dalam Mewujudkan Masyarakat Tangguh dan Partisipatif Terhadap Bencana

Menurut wawancara bersama Wakil Ketua Klasis Sinabun tantangan yang dihadapi dalam pengorganisasian penanggulangan bencana Sinabun ataupun implementasi program peningkatan kapasitas masyarakat adalah keacuhan masyarakat termasuk jemaat GBKP di wilayah pelayanan Klasis Sinabun. Salah satu contoh keacuhan masyarakat ialah ketika ada koordinasi dari tingkat Moderamen ke Klasis untuk melakukan pendataan warga jemaat yang rentan atau berada dalam radius jangkauan 10 KM dari kaki Gunung Sinabung, masyarakat hanya merespons sebagai informasi belaka tanpa ada tindakan (*Chat Whattsapp Dengan Wakil Ketua Klasis Sinabun Pdt. Piterson Sembiring., S.Th, Yogyakarta, 25 Oktober 2022.*).

Permasalahan lainnya ialah kurangnya koordinasi pada tingkat pelayan khusus (Pendeta, Penatua, dan Diaken) untuk melakukan konsolidasi dalam wilayah gereja lokal (Majelis Runggun). Permasalahan kurangnya koordinasi menurut teori komunikasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu 1: informasi menjadi peranan penting dalam membentuk suatu sistem komunikasi yang baik, 2. Perbedaan ataupun esensi informasi yang berbeda dikarenakan ketidakjelasan dapat mempengaruhi terbentuknya pemahaman dan mempengaruhi komunikasi, 3. Membangun informasi yang jelas dan valid untuk membangun komunikasi yang baik (H.Turner, 2008, 5-8). Faktor ambiguitas informasi dan

kurangnya sinergitas dalam membangun komunikasi menyebabkan informasi menjadi permasalahan dalam membangun kapasitas dan peningkatan kapabilitas masyarakat. Melalui pendataan masyarakat yang dilakukan oleh GBKP dengan tujuan menjadi *big data* seharusnya menjadi potensi dalam rangka melakukan pelatihan maupun pembinaan bagi masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah. Namun disebabkan kurang responsifnya masyarakat menjadi minimnya data serta sinergitas dalam komunikasi yang berdampak pada penanggulangan permasalahan di jemaat-jemaat, sehingga terkesan gereja-gereja lokal kurang responsif menyikapi kepentingan ataupun kebutuhan. (*Perencanaan Sasaran Program 2023 : Jemaat Menjadi Pelaku Aktif Pelayanan*, n.d.).

Tantangan GBKP Klasis Sinabun dalam konsolidasi masyarakat di sekitar wilayah Gunung Sinabung terletak pada kerentanan yang dihadapi oleh gereja-gereja lokal terkhusus para pelayan dari gereja lokal (*runggun*). Kurangnya kesadaran para pelayan di gereja lokal dalam penanganan bencana yang bersifat preventif, para pelayan (Pendeta, penatua, Diaken) yang masih belum tanggap dengan pendataan dan juga inventarisasi yang dilakukan moderamen bekerja sama dengan pemerintah melalui BNPB. Selain kerentanan dari aktor gereja lokal, juga terdapat permasalahan dari Moderamen (pemimpin pusat GBKP) yang kurang dalam melakukan *monitoring* dan kontrol terhadap gereja-gereja lokal, terkhusus wilayah pelayanan di daerah Klasis Sinabun. Secara edukasi melalui program-program pembinaan, bahan-bahan edukatif atau khotbah, dan katekisasi juga belum menunjukkan perspektif peningkatan kapasitas terhadap bencana, padahal setiap saat ancaman yang dihadapi dari erupsi Sinabung sangat rentan berdampak bagi masyarakat penyintas Sinabung.

Dalam evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Litbang (Lembaga Penelitian & Pengembangan) GBKP yang menunjukkan bahwa tingkat solidaritas masih tergolong rendah pada tataran *Runggun* disebabkan kurangnya koordinasi dan tindakan untuk menumbuhkan kesadaran antar jemaat. Koordinasi merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi ancaman ataupun tantangan, fungsi koordinasi dapat saling membangun dan menumbuhkan tingkat kesadaran akan keterkaitan dan solidaritas satu dengan yang lainnya (Moderamen GBKP, 2021, 24).

Kerentanan dari masyarakat sekitar Sinabung merupakan salah satu faktor penanggulangan bencana yang masih belum maksimal. Masyarakat sekitar Sinabung masih menganggap bahwa bencana Sinabung bukan menjadi suatu ancaman yang patut ditakuti, terlihat dari masyarakat yang acuh dengan batas aman kegiatan (*safety zone*) yang sudah dilakukan pemerintah. Selain kurangnya kesadaran, masyarakat sekitar Sinabung juga masih berfokus pada bantuan pemerintah, namun tidak menyadari bahwa ketahanan itu dibangun dari kesadaran dan peran masyarakat (*local capacity*) baik dalam edukasi, program kreatif desa, pemuda tanggap bencana, dan berbagai perspektif yang dapat meningkatkan ketahanan menghadapi bencana.

Berkaitan dengan kerentanan (*vulnerability*) menurut *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)*, kerentanan ditentukan oleh beragam faktor seperti sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan, hal ini yang meningkatkan kerawanan individu maupun

lingkungan dalam menghadapi ancaman dan bahaya dari bencana yang terjadi (Hapsoro & Buchori, 2015, 546). Menyoroti kerentanan yang dihadapi oleh GBKP Klasis Sinabun dalam situasi masyarakat penyintas Sinabung disebabkan faktor ekonomi. Perihal ekonomi menjadi hambatan masyarakat dalam melakukan himbauan pemerintah dan gereja, karena fokus masyarakat pada pemenuhan kebutuhan akan hidup sekalipun hal tersebut mengabaikan ancaman erupsi Sinabung yang bisa mengancam keamanan insani baik secara individu maupun komunitas masyarakat. Sisi edukasi yang mempengaruhi kesadaran masyarakat juga menjadi kerentanan yang dirasakan oleh masyarakat penyintas Sinabung. Dampak yang terlihat dari sektor edukasi ialah masyarakat yang masih bergantung pada bantuan pemerintah (*top*) namun tidak turut berproses bersama dalam peningkatan kemampuan dan *skill* yang dimiliki untuk bertahan hidup melalui program-program yang kreatif. Pemerintah kurang memberikan pelatihan dan kegiatan kreatif bagi masyarakat, padahal kurangnya kesadaran dan edukasi menjadi faktor ancaman erupsi Sinabung yang nyata bagi masyarakat penyintas.

Analisis Perspektif Resiliensi Dalam Kasus Penyintas Erupsi Sinabun

Menganalisis kasus penyintas erupsi Sinabung di wilayah Klasis Sinabun melalui perspektif keamanan insani terlebih dahulu melihat peran gereja yang mengambil bagian dalam penanggulangan bencana Sinabung. Sesuai dengan sistem Presbiterial-Sinodal di GBKP bahwa mandat untuk melakukan peningkatan kapasitas dan emansipasi keamanan manusia dalam program sinodal (BPMS) dilakukan oleh gereja-gereja lokal (BPMR). Mengandalkan gereja-gereja lokal dalam melakukan tindakan berdasarkan nilai keamanan dan edukasi terlihat kurang efektif oleh gereja-gereja lokal, menurut penuturan Wakil Ketua Klasis Sinabun pemimpin gereja dalam hal ini Pendeta bersama Penatua serta Diaken (Majelis Khusus) tidak melakukan tindakan-tindakan yang sudah diputuskan secara sinodal.

Dalam perspektif resiliensi untuk mewujudkan nilai keamanan insani dibutuhkan sinergi *top-down* internal sistem GBKP dalam menangani kasus bencana (Geovasky, 2015, 5). Dalam kasus ini, terlihat jika peran GBKP Klasis Sinabun dalam melakukan tindakan penanganan hanya ketika terjadi erupsi ataupun bencana lanjutan. Hal tersebut menjadikan kerentanan dan seolah-olah penanganan terhadap bencana hanya dilakukan ketika bencana muncul, selain itu kurangnya pemahaman dan kesadaran menjadikan pemimpin gereja di daerah lokal tidak banyak melakukan edukasi ataupun tindakan preventif dalam meningkatkan kapasitas. Terlihat dalam laporan-laporan tahunan dari menurut penuturan Wakil Ketua Klasis Sinabun tidak ada *runggun-runggun* yang melakukan kegiatan penyadaran dan peningkatan kapasitas bencana.

Pemahaman masyarakat sekitar Gunung Sinabung juga masih terkesan menunggu bantuan dan kurang mengambil peran dalam pengurangan resiko bencana serta peningkatan kapasitas individu ataupun komunitas. Hal ini terlihat dalam kunjungan Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2021 terhadap masyarakat penyintas Sinabung (Efendi, 2021), menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan

tindakan desekuritisasi tidak dilakukan baik secara individu maupun komunal. Menurut Geertz keamanan manusia harus mendesekuritisasi peran pemerintah dengan mengakui sifat identitas individu yang melekat secara budaya, perlu adanya konstruksi bersama berbasis transformatif dalam melihat prioritas kebutuhan individu dan bersama (Shani, 2010, 65).

Nilai religius-kultural ataupun *local wisdom* menjadi kekuatan dalam peningkatan kesadaran terhadap ancaman bencana menurut perspektif keamanan insani. Dalam pandangan Shani peningkatan kesadaran dapat mempengaruhi nilai martabat (*freedom for dignity*) dan menyadari makna identitas dalam budaya (Shani, 2007, 5). Berkaca dari nilai *local wisdom* dari sinilah seharusnya peran masyarakat penyintas Sinabung menyadari nilai kultural budaya Karo¹ dan nilai religius hadir melalui peran gereja yang mempengaruhi nilai keamanan insani bersama. Institusi agama diharapkan memberikan pengaruh religius dan saling mewujudkan nilai resiliensi dalam tindakan tangguh bencana. Kesadaran masyarakat penyintas Sinabung dan juga GBKP di wilayah Klasis Sinabun perlu ditingkatkan kapabilitas agar secara holistik mampu membangun resiliensi yang tangguh.

Lembaga agama memiliki fungsi nyata dalam kehidupan sosial. Gereja sebagai lembaga agama memiliki fungsi *sacred* dan *profan* yang berfungsi aktif mempertahankan keutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Kelangsungan hidup bersama menjadi fungsi nyata gereja yang tidak hanya berfokus pada fungsi internal. Gereja didorong untuk memberi kontribusi penyelamatan melalui kehidupan antar sesama manusia. Menurut Betty R. Scharf dalam Sudianto, Kinurung Maleh, dan Hadi Saputra agama berfungsi edukatif dan transformatif. Tugas gereja sebagai lembaga yudikatif memberikan pengajaran dan memahami tujuan bersama sebagai tanggung jawab keselamatan. Dalam aspek penyintas bencana, gereja memiliki tanggung jawab edukasi memberikan kesadaran berhubungan dengan peningkatan kapabilitas menghadapi bencana. Fungsi transformatif mewujudkan melalui sistem-sistem gereja yang dinamis memberikan pengaruh bagi kemaslahatan bersama. Sistem dan aturan gereja dalam penanggulangan bencana hendaknya memiliki kesediaan transformasi nilai lama menjadi nilai baru. Nilai-nilai transformatif gereja memberikan kesadaran kepada setiap pihak untuk menghargai martabat manusia (Sudianto et al., 2022, 74-78).

¹ Nilai kultural budaya Karo yang menjadi *core vital* dalam mewujudkan nilai *human security* dan peningkatan resiliensi adalah relasi *Rakut Sitelu* yang menjadi kekuatan antar individu untuk saling menghargai dan mewujudkan nilai kebersamaan melalui ikatan kekeluargaan. Serta budaya *Runggu* yaitu budaya musyawarah berdasarkan nilai etis kultural, sehingga memberi ruang kebebasan nilai kemanusiaan serta memberi kesadaran dalam peningkatan kapabilitas bersama menghadapi bencana. Biasanya *Runggu* diinisiasi oleh pemangku jabatan adat terkadang juga pemimpin agama di suatu wilayah atau desa (Lih. M. Abduh Lubis, "Budaya dan Solidaritas Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo," *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 2018, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/112-06/1192>), 247.

Evaluasi Sistem GBKP Klasis Sinabun Dalam Peran Meningkatkan Kapabilitas

Dalam revitalisasi peran gereja bagi peningkatan kapabilitas, penulis melihat permasalahan terletak pada komunikasi. Pernyataan Cox dalam *environmental communication* terdapat 2 dampak dalam komunikasi lingkungan terkhusus dalam *disastercase* yaitu 1. Melalui komunikasi baik antar setiap kelompok terhadap semua pihak dapat saling mengevaluasi sisi efektif suatu program dalam komunitas serta membangun strategi ulang untuk meminimalisasi risiko dan meningkatkan potensi kelompok (*Effectiveness Communication*), 2. Pengaruh budaya memberikan dampak pemahaman dan saling membangun penerimaan diri atas risiko dalam komunitas, sehingga dari penerimaan diri akan terbangun metode atau pola dalam menanggulangi kerentanan bersama (*Risk Communication*)(Robert Cox, 2010, 18-19).

Sisi komunikatif dan bersinergi inilah yang harus dilakukan GBKP dalam aras lokal maupun klasis sebagai jembatan pada tingkat sinode untuk melakukan tindakan dan perwujudan keamanan insani. Meskipun pusat dari sistem Presbiterial-Sinodal adalah jemaat dan keputusan yang diambil oleh sidang majelis (BPMR) di gereja-gereja lokal, namun perlunya tindakan monitoring dan pendampingan untuk melakukan tindakan preventif ataupun edukasi. Desentralisasi yang terjadi dari keputusan sinode dan diaplikasikan dalam setiap gereja-gereja lokal, terkhusus dalam hal ini Klasis Sinabun perlu tetap mendapatkan pengawasan(S. Jonathan Meliala & Berthalyna Br. Tarigan, 2016, 88). Pendeta sebagai pemimpin jemaat belum secara maksimal memahami dan menyadari peningkatan keamanan insani dan resiliensi di tengah bencana, sinergitas itu perlu diwujudkan dalam pembinaan pemuda tanggap bencana yang dilakukan oleh klasis terhadap runggun-runggun di Klasis Sinabun. Melalui pembinaan yang dilakukan dapat di *follow-up* menjadi program gereja-gereja lokal dalam setiap pencanaan tahun gereja. Melalui program-program seperti pembinaan sadar bencana, pengelolaan pertanian di daerah bencana, dan mitigasi bencana maka akan menumbuhkan kesadaran masyarakat lokal. Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari relasi yang dibangun oleh Klasis Sinabun dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo(Dinas Kominfo Kabupaten Karo, 2022).

Keterlibatan gereja seharusnya dilakukan atas dasar keterbukaan dan komunikasi yang dilakukan melalui dialog serta pemenuhan aspek *freedom for opportunity*, sehingga dalam hal ini Sinode tidak melakukan tindakan intervensi mendalam namun tetap memberikan perhatian terhadap gereja-gereja lokal melalui Klasis Sinabun. Menurut Hall, aspek komunikatif ini perlu dilakukan atas dasar keterbukaan dan dialog untuk mewujudkan keamanan bersama dan memperkecil kerentanan (Lamont, 2013, 74-74).

Selain revitalisasi sistem dari *top* (Moderamen dan BNPB), perlu revitalisasi dari *down* yang perlu dilakukan dalam hal ini nilai kultural dari *Rakut Sitelu (Kalimbubu—Sembuyak-Anak Beru)* yang merupakan ikatan kekeluargaan berdasarkan marga (*family*). Ikatan marga menjadi ikatan kuat untuk membangun kesadaran bersama dalam peningkatan nilai keamanan individu. Nilai kultural ini membawa kesadaran satu dengan lain saling mengingatkan akan kerentanan terhadap bencana sehingga peka dan ikut

memikirkan hal-hal yang dapat meningkatkan kapabilitas bersama. Solidaritas dan ikatan kekeluargaan menjadi kekuatan kultural dalam masyarakat Karo, sehingga dalam menentukan tindakan dapat dilakukan secara kolektif bagi peningkatan kapasitas. Gereja-gereja lokal dapat mengambil peran untuk memberikan pendidikan dan pemahaman dengan membawa nilai-nilai religius. Nilai yang mengutamakan esensi kemanusiaan dan menekankan kesinambungan antara manusia dengan keutuhan ciptaan lainnya. Pendeta, Penatua, dan Diaken memberikan perhatian dan edukasi terhadap masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menginventarisasi data-data dan kebutuhan masyarakat penyintas Sinabung. Penyadaran masyarakat berawal dari nilai keteladanan yang dilakukan oleh sikap religius dari gereja, dalam hal ini peran GBKP Klasis Sinabun menjadi vital untuk melakukan peningkatan kesadaran dan kapabilitas masyarakat. Melalui tindakan program-program berbasis pendidikan Kristiani (baik dalam katekisasi, khotbah, maupun renungan gereja), yang menekankan pada spiritualitas ekologi, dengan harapan dapat mereduksi nilai-nilai manusia yang berpusat pada dirinya (*anthroposisme*). Menurut Gerrit Singgih, perlunya juga dibangun kesadaran nilai religius yang pro-ekologis, hal ini akan mentransformasi pemikiran yang hanya berpusat pada keamanan insani dan peningkatan kapasitas (Singgih, 2020, 133).

Dalam rangka desentralisasi dan restrukturisasi sistem gereja perlu memanfaatkan teknologi. Revitalisasi sistem gereja yang berfungsi di tengah masyarakat perlu memanfaatkan potensi digital dalam rangka menumbuhkan kesadaran ekologis. Selain itu pemanfaatan teknologi digital juga mampu mentransformasi sistem gereja yang statis menjadi lebih dinamis. Kesenjangan sistem komunikasi dari pusat hingga ke gereja lokal dapat diatasi dengan memaksimalkan pelayanan melalui digitalisasi. Pelayanan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran ekologis, memberikan edukasi berhubungan dengan mitigasi bencana, dan berbagai kegiatan yang meningkatkan kapabilitas masyarakat dan juga jemaat di GBKP Klasis Sinabun. Media elektronik menjadi sarana misi gereja untuk menumbuhkan kesadaran danewartakan Allah dalam kehidupan bersama (Inriani, 2021, 108-111).

Kesimpulan

Gereja sebagai persekutuan haruslah merespons secara holistik pergumulan dan tantangan manusia. Hal tersebut menjadi dorongan untuk GBKP secara sinodal dan juga aras gereja lokal di sekitar Gunung Sinabung untuk menjawab tantangan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sekitar Sinabung. Perspektif teori keamanan insani dan resiliensi menunjukkan peran vital GBKP Klasis Sinabun dan GBKP secara sinodal berperan dalam peningkatan kapabilitas ancaman erupsi Sinabung yang setiap saat dapat terjadi. Paradigma dalam teori keamanan insani dan resiliensi terhadap bencana mendorong saling proaktif dan relasional baik pengurus gereja (Pendeta, Penatua, Diaken) dan masyarakat sekitar Sinabung. Pendekatan holistik oleh GBKP hendaknya menjadi bagian dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat bersama. Peran gereja dilakukan bekerja sama dengan pemerintah berproses dalam program yang bukan hanya bersifat

temporer (bantuan langsung) namun bersifat *sustainable* (edukasi, program mitigasi, dan pelatihan kreatif masyarakat), sehingga menjadi perwujudan dari masyarakat tangguh bencana dan memiliki kemampuan mengelola ancaman bencana sebagai bagian dari proses keselarasan dengan alam.

Daftar Rujukan

- Abu Sinabung Kembali Membubung - *Historia*. (n.d.). Retrieved November 3, 2022, from <https://historia.id/kultur/articles/abu-sinabung-kembali-membubung-DnwdB/page/1>
- Avery Dulles S.J. (1990). *Model-Model Gereja*. Nusa Indah.
- Chat Whatsapp Dengan Wakil Ketua Klasis Sinabun Pdt. Piterson Sembiring., S.Th. (n.d.).
- Commission For Human Security. (2003). *Commission for Human Security, Human Security Now (The Final Report of the Commission on Human Security)*. Oxford University Press.
- Dinas Kominfo Kabupaten Karo. (2022). *Website Kabupaten Karo - UPN "Veteran" Yogyakarta Kerja Sama dengan Pemkab Karo Lakukan FGD Komunikasi dan Informasi Bencana*. <https://web.karokab.go.id/berita/9804-upn-veteran-yogyakarta-kerja-sama-dengan-pemkab-karo-lakukan-fgd-komunikasi-dan-informasi-bencana>
- Dr. Jan Hendriks. (2002). *Jemaat Vital dan Menarik: Membangun Jemaat Dengan Menggunakan Metode Lima Faktor* (H. F.Hartono (Ed.)). Kanisius.
- Dr. Syamsul Maarif. (2013). Harmonisasi Hukum Dalam Penanggulangan Bencana. *GEMA BNPB: Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana*.
- Efendi, R. (2021). *Risma Dorong Warga Terdampak Letusan Gunung Sinabung Kembangkan Usaha - Regional Liputan6.com*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/regional/read/4715529/risma-dorong-warga-terdampak-letusan-gunung-sinabung-kembangkan-usaha>
- Geovasky, I. (2015a). *Human Security and Resilience Approach on Disaster Management in Indonesia*.
- Geovasky, I. (2015b). Human Security and Resilience Approaches On Disaster Management In Indonesia: The 2010 Merapi Volcano Eruption Case Study. *Human Security: Problem Solving and Critical Perspective*.
- Ginting, T. (2021). *Website Kabupaten Karo - Meninjau Desa di Sekitar Gunung Sinabung*. <https://www.karokab.go.id/id/berita/9240-meninjau-desa-di-sekitar-gunung-sinabung>
- Gunung Sinabung. (2022). Dinas Komunikasi Dan Informatika Budaya Karo. <https://www.karokab.go.id/id/potensi-daerah/pariwisata/tujuan-wisata/457-gunung-sinabung>
- H.Turner, R. W. and L. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi Jakarta : Salemba Humanik* (1st ed.). Salemba Humanik.
- Hapsoro, A. W., & Buchori, I. (2015). Kajian Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Terhadap Bencana Banjir (Studi Kasus: Wilayah Pesisir Kota Pekalongan). *Teknik PWK*, 4, 542–553.
- Inriani, E. (2021). *Strategi Gereja Memaksimalkan Tri Panggilan Gereja Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Teologi Pabelum*. <https://jurnal.stt-gke.ac.id/index.php/pabelumjtp/article/view/2/1>
- Lamont, P. A. H. and M. (2013). *Social Resilience in the Neoliberal Era*. Cambridge University Press.

- Lubis, M. A. (2018). *Budaya dan Solidaritas Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo*. Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/112-06/1192>
- Moderamen GBKP. (2016). *Buku Saku: Pokok-Pokok Pengakuan Iman GBKP (Konfesi)*. Abdi Karya.
- Moderamen GBKP. (2021a). *GBP (Garis-Garis) Besar Pelayanan GBKP Tahun 2021-2025*. Abdi Karya-GBKP.
- Moderamen GBKP. (2021b). *Tata Gereja GBKP: Edisi Sinode XXXVI, 2021*. Abdi Karya.
- Moderamen GBKP. (2022). *Sasaran Pelayanan GBKP Tahun 2022*. Abdi Karya-GBKP.
- Newman, E. (2010). Critical Human Security. *Review of International Studies*, 36, 77–94.
- oneclickgbkp*. (n.d.). Retrieved November 4, 2022, from https://gbkp.or.id/new/?page=all_home&lang=bahasa
- Perencanaan Sasaran Program 2023 : Jemaat Menjadi Pelaku Aktif Pelayanan*. (n.d.). Retrieved November 17, 2022, from https://gbkp.or.id/new/?page=berita_full&id=48&tabel=tb_berita&lang=bahasa&key=id_berita
- Ramirez., M. E. &. (2007). Resilience: a concept analysis. *Nursing Forum*, 42, No. 2.
- Reid, J. (2012). The Disastrous and Politically Debased Subject of Resilience. *Development Dialogue Special Issue, No 58*, 66–80.
- Resilience Definition & Meaning - Merriam-Webster*. (n.d.). Retrieved November 5, 2022, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/resilience>
- Robert Cox. (2010). *Environmental Communication and The Public Sphere*. Sage Publication.
- S. Jonathan Meliala & Berthalyna Br. Tarigan. (2016). *Presbiterial Sinodal: Kajian Historis Tentang Sistem Pemerintahan Gereja Presbiterial Sinodal dan Pelaksanaannya di GBKP (1941-2015) Serta Revitalisasinya Bagi GBKP Masa Kini*. Praninta Aksara.
- Shani, G. (2007). Introduction: Protecting Human Security in a Post 9/11 World. In and M. K. P. Giorgio Shani, Makoto Sato (Ed.), *Protecting Human Security in a Post 9/11 World* (pp. 1–19). Palgrave Macmillan.
- Shani, G. (2010). Securitizing “Bare Life”: Critical Perspectives on Human Security Discourse. In D. C. and N. Hynek (Ed.), *Critical Perspectives on Human Security: Discourses of Emancipation and Regimes of Power*. Oxon: Routledge.
- Singgih, E. G. (2020). *Agama dan Kerusakan Ekologi: Mempertimbangkan ‘Tesis White’ dalam Konteks Indonesia*. Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW. <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gemateologika/article/view/614/326>
- Sudianto, Maleh, K., & Saputra, H. (2022). *Gereja Kalimantan Evangelis Menyikapi Proyek Ibu Kota Negara Baru*. Jurnal Teologi Pabelum. <https://jurnal.stt-gke.ac.id/index.php/pabelumjtp/article/view/25/24>
- Th. Muller Kruger. (1959). *Sedjarah Geredja Di Indonesia*. BPK-Gunung Mulia.
- Theophilus Yanuarto. (2021). *Gereja Berperan dalam Menyikapi Ancaman Bahaya*. Bnpb.Go.Id. <https://www.bnpb.go.id/berita/gereja-berperan-dalam-menyikapi-ancaman-bahaya-di-tengah-masyarakat>
- Tim Redaksi BNPB. (2013). *Riwayat Letusan Sinabung. GEMA BNPB: Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana, 4 No. 3*.